

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR



- Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan - Karanganyar
- Nomor Telepon : (0271) 465591
- Website : dispermades.karanganyarkab.go.id
- E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja pemerintahan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan ini disusun berdasarkan data dan analisis capaian kinerja dalam berbagai program serta kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini juga berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan transparansi serta peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan strategi pembangunan daerah di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan, data, maupun kolaborasi dalam penyusunan laporan ini. Sinergi dari berbagai pemangku kepentingan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Karanganyar, Februari 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....II

DAFTAR ISIIII

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR IX

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. LATAR BELAKANG1

1.2. GAMBARAN UMUM1

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja2

1.2.2. Anggaran.....3

1.3. ISU STRATEGIS.....3

1.4. LANDASAN HUKUM.....3

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....5

2.1. RENCANA STRATEGIS5

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN7

2.3. PERJANJIAN KINERJA7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA12

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI12

3.1.1. Skala Capaian Kinerja12

3.1.2. Capaian Kinerja13

3.1.3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....13

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

13

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....14

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan16

3.2. REALISASI ANGGARAN70

BAB IV PENUTUP.....75

4.1. KESIMPULAN75

4.2. SARAN.....75

LAMPIRAN.....77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n3

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026.....5

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun n.....6

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....7

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20248

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20248

Tabel 7. Pengkategorian Capaian Kinerja.....12

Tabel 8. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....13

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja.....13

Tabel 10. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis14

Tabel 11. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi14

Tabel 12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.....16

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah17

Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.....18

Tabel 15. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD19

Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD20

Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD20

Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD21

Tabel 19. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah22

Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.....23

Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah24

Tabel 22. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....25

Tabel 23. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah26

Tabel 24. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor27

Tabel 25. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.....27

Tabel 26. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan28

Tabel 27. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan29

Tabel 28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD29

Tabel 29. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.....30

Tabel 30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....31

Tabel 31. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat31

Tabel 32. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik32

Tabel 33. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor33

Tabel 34. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....34

Tabel 35. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.....35

Tabel 36. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.....36

Tabel 37. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya37

Tabel 38. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penataan Desa37

Tabel 39. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa38

Tabel 40. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa39

Tabel 41. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa40

Tabel 42. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa.	41
Tabel 43. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	42
Tabel 44. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	43
Tabel 45. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	44
Tabel 46. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa	45
Tabel 47. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46
Tabel 48. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	47
Tabel 49. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	48
Tabel 50. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49
Tabel 51. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	51
Tabel 52. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa.....	52
Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	53
Tabel 54. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	54
Tabel 55. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa.....	56
Tabel 56. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa.....	57
Tabel 57. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.....	58
Tabel 58. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59
Tabel 59. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	60
Tabel 60. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	

Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.....61

Tabel 61. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penataan,
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat62

Tabel 62. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat63

Tabel 63. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa.....64

Tabel 64. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.....66

Tabel 65. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat67

Tabel 66. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.....68

Tabel 67. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK
dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
.....69

Tabel 68. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....70

Tabel 69. Efisiensi Capaian Penggunaan Anggaran74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....2

Gambar 2. Monitoring dan Evaluasi Penataan Dusun se-Kabupaten Karanganyar Tahap II (Selasa, 30 April 2024).....39

Gambar 3. Desk LPJ Bankeu Sarpras Prov. Jateng Tahun 2024 (Senin, 29 Juli 2024)40

Gambar 4. Rakor Kawasan Perdesaan Kab. Karanganyar (Senin, 9 Desember 2024)44

Gambar 5. Pembinaan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Selasa, 19 November 2024)47

Gambar 6. Rapat Sosialisasi Produk Hukum Desa (Rabu, 12 Juni 2024).....48

Gambar 7. Rakor Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa dalam Perencanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi oleh Pemerintah Desa (Selasa, 30 Juli 2024) ...50

Gambar 8. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa Via CMS Bank Daerah dalam Penyaluran Siltap Kades dan Perangkat Desa (Jumat, 26 Juli 2024)51

Gambar 9. Mendampingi Sampling BPKP tentang Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Kinerja BUM Desa Tahun Buku 2023 pada Kab. Karanganyar (Rabu, 22 Mei 2024)52

Gambar 10. Seleksi Tambahan Calon Kades PAW Antar Waktu Desa Berjo (Senin, 19 Februari 2024).....54

Gambar 11. Rakor Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selasa, 19 September 2024).....55

Gambar 12. Monev Pengisian Aplikasi Prodeskel dan Epdeskel (Senin, 18 Maret 2024)..56

Gambar 13. Pembinaan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Wilayah Kecamatan Jaten (Selasa, 22 Oktober 2024)58

Gambar 14. Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (UP2K0PKK) (Selasa, 22 Oktober 2024).....65

Gambar 15. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Karanganyar (Kamis, 8 Agustus 2024).....66

Gambar 16. Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III (Rabu, 24 Juli 2024)67

Gambar 17. Pembinaan Administrasi 10 Program Pokok PKK (Jumat, 8 Maret 2024)70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. GAMBARAN UMUM

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

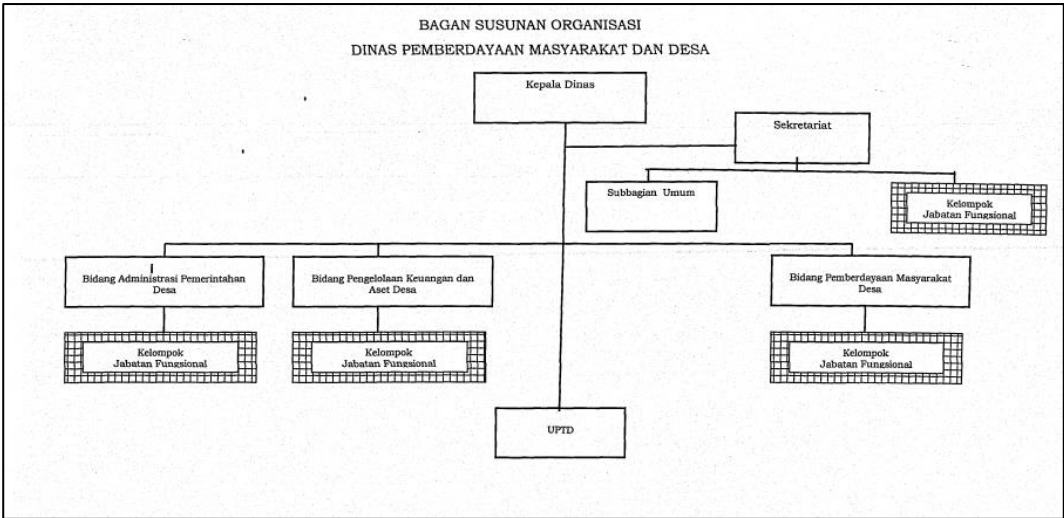
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- o perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pmerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- o pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- o pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- o pelaksanaan administrasi Dinas;
- o pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sumber : Peraturan Bupati Karanganyar No. 112 Tahun 2021

1.2.2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 22.702.581.246
APBD	Tahun n	Rp 17.535.742.012
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

1.3. ISU STRATEGIS

Aspek-Aspek Strategis Dispermades diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dispermades) Permasalahan dan atau arah kebijakan dan Program RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 dan Isu utama Dispermades terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Dispermasdes yaitu belum optimalnya Indeks Desa Membangun, hal ini karena penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes) belum berjalan secara efektif

1.4. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3.2	Realisasi Anggaran
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.RENCANA STRATEGIS

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social, serta meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7088	0,7098	0,7108
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	74	75

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun n

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	Indeks yang mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian desa.	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Indeks Desa Membangun
Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	Nilai yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.	Hasil penilaian oleh Inspektorat Daerah	LHE dari Inspektarot

2.2.RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7088
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7088
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73

Sumber: Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Desa yang digasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 %
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	162 desa
		Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	162 desa
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa	1500 unit
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	100 %
		Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	85 %
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	162 desa
		Jumlah desa tertib pengelolaan asset	162 desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi desa	1 dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	1; 3 dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	2 dokumen
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	486 orang
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa	2 laporan
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	2 dokumen
	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	1 dokumen
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1 laporan
	Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	40 laporan
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	1134 orang
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	177
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95
3.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	3 dokumen
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen
	Fasilitasi Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan	1 dokumen
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	82 %
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 %
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Oemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruan), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hkum adat	3 dokumen
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, Rw, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang diingkatkan kapasitasnya	1 lembaga
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2 dokumen
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 laporan
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %
5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen keuangan	1 dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang/bulan
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	16 orang
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2; 12 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	1 unit
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)	43 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 7. Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Melebihi target	> 100 %

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
2	Sesuai target	100 %
3	Di bawah target	< 100 %

3.1.2. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,7088	0,7379	104,25 %	Melebihi target	Idm kemendesa
Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	70,20	96,16 %	Di bawah target	LHE Inspektorat

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

3.1.3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)		
		Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6937	0,7078	0,7162	0,7088	0,7379	104,1 %
Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	68,85	70,32	69,35	73	70,20*	96,16 %

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =3/4*100
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Mandiri (IDM)	0,7379	0,7088	104,1 %
Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	70,20*	73	96,16 %

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keg agalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkat nya kualitas pembangu nan desa	Indeks Desa Membangu n (IDM)	0,7088	0,7379	104,1 %	Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa yang telah dijalankan berjalan dengan baik, didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal turut berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kualitas desa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam	• Mempertahankan program pembangunan desa yang telah berjalan dengan baik. • Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan. • Memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keg agalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pelaksanaan pembangunan yang perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh desa	
Meningkat nya kualitas tata laksana pemerinta han	Nilai SAKIP	73	70,20*	96,16 %	Meskipun hampir mencapai target, masih ada sedikit kekurangan dalam pencapaian kualitas tata laksana pemerintahan. Menunjukkan masih ada aspek yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan.	• Melakukan evaluasi terhadap sistem tata laksana pemerintahan untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. • Mengoptimalkan manajemen kinerja dan akuntabilitas dalam pemerintahan. • Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait SAKIP

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar dari target 0,7088 terealisasi 0,7379 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 104,1 %. Indeks Desa Membangun meletakkan Prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Nilai SAKIP, dari hasil penilaian SAKIP oleh nspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk hasil penilaian tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **70,20** dengan predikat “**BB**” (**sangat baik**). Pencaian predikat tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja (memperoleh nilai sebesar **21,00** dari bobot nilai maksimal 30)
 - b. Pengukuran Kinerja (memperoleh nilai sebesar **20,40** dari bobot nilai maksimal 30)
 - c. Pelaporan Kinerja (memperoleh nilai sebesar **10,80** dari bobot nilai maksimal 15)
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (memperoleh nilai sebesar **18,00** dari bobot nilai maksimal 25)

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran/outcome. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didukung oleh 5 program, 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 17.535.742.012,00,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah melalui pengelolaan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

- Target dan Realisasi Keuangan Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.578.167.212,- dan terealisasi sebesar Rp.5.447.399.516,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,66%.
- Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Tabel 12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

No	Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
1	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program
Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam pemeliharaan aset daerah yang mengakibatkan fasilitas pemerintahan tidak berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan sinergi antar bidang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar lebih sistematis.

Selain itu, pengalokasian anggaran harus lebih tepat sasaran untuk memastikan pemeliharaan aset daerah dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan tiga proses penting dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di daerah. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi yang akan diterapkan dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia di daerah. Penganggaran adalah proses mengalokasikan dana dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan. Evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi keberhasilan dari tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan dan dilaksanakan dalam proses penganggaran.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.72.221.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.976.100,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,28%.
- Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	8	8	100%

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan
Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini meliputi keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan penguatan sistem koordinasi antar bidang, penerapan

teknologi dalam perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam melakukan evaluasi berbasis data.

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyusunan dokumen ini sangat penting untuk mendukung efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah serta menjamin alokasi sumber daya yang optimal.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perubahan dalam RKA-SKPD dapat dilakukan dengan baik berdasarkan evaluasi dan kebutuhan prioritas daerah. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi aktual di lapangan sehingga kebijakan pembangunan dapat tetap berjalan sesuai target.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 15. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini berfokus pada penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran daerah. Penyusunan dokumen ini sangat penting agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perubahan dalam DPA-SKPD dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Perubahan ini sangat diperlukan apabila terjadi pergeseran prioritas pembangunan atau adanya perubahan kondisi keuangan daerah.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				
1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan yang mencerminkan capaian kinerja SKPD serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini menjadi dasar dalam evaluasi efektivitas penggunaan anggaran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.68.221.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.976.100,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,18%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah keterlambatan dalam penyusunan laporan serta kurangnya data yang akurat dalam evaluasi kinerja. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi, serta memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai teknik penyusunan laporan yang berbasis data agar lebih akurat dan tepat waktu.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penganggaran, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pelaporan, dan pengauditan. Ini meliputi perencanaan

anggaran, penganggaran berbasis kinerja, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pengeluaran, pengendalian penerimaan, pengelolaan aset daerah, dan pengauditan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan serta untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.678.103.472,- dan terealisasi sebesar Rp.4.560.589.193,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,49%.
- Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 19. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Jumlah Laporan dokumen keuangan	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan
Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan akibat proses administrasi yang belum optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Solusinya adalah dengan memperbaiki sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi, mempercepat proses administrasi keuangan, serta memberikan pelatihan kepada pegawai terkait pengelolaan keuangan daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memastikan bahwa seluruh ASN menerima hak mereka tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya gaji dan tunjangan yang memadai, diharapkan ASN dapat bekerja lebih profesional dan produktif dalam menjalankan tugasnya.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.678.103.472,- dan terealisasi sebesar Rp.4.560.589.193,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,49%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	35	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi berbagai proses yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai di lingkungan OPD. Ini termasuk proses rekrutmen, pengembangan karier, pengelolaan gaji dan tunjangan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan pemberhentian pegawai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola pegawai dengan efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

○ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.123.149.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.592.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 92,24%.

○ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Jumlah Laporan dokumen keuangan	dokumen	1	1	100 %

- o Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan terbatasnya anggaran untuk program pengembangan kompetensi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang dalam penyediaan anggaran pelatihan serta kerja sama dengan lembaga pelatihan profesional agar pelaksanaan pendidikan pegawai lebih efektif.

a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pelatihan yang tepat sasaran, pegawai akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi didukung dengan anggaran sebesar Rp.123.149.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.592.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 92,24%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 22. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	48	51	106,25 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi berbagai proses yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi di lingkungan OPD. Ini termasuk proses pengelolaan dokumen, arsip, dan surat menyurat, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan gedung dan fasilitas, serta pengelolaan logistik dan transportasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola administrasi secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa semua dokumen, arsip, dan surat menyurat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola dengan baik dan aman. Kegiatan ini juga termasuk pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan aset. Kegiatan ini sangat penting dalam menjamin kelancaran proses administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan membuat proses administrasi lebih transparan, efisien, dan efektif.

○ Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.283.299.483,- dan terealisasi sebesar Rp.283.031.900,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,91%.

- o Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 23. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	100	100 %

- o Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan administrasi. Solusinya adalah dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran serta memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan dokumen dan koordinasi antar unit kerja.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kantor memiliki instalasi listrik dan penerangan yang memadai guna mendukung kinerja pegawai serta pelayanan kepada masyarakat.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.995.500,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,89%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 24. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan perlengkapan kantor yang dibutuhkan agar operasional pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pegawai dapat bekerja dengan lebih nyaman dan efektif.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp.100.010.483,- dan terealisasi sebesar Rp.99.827.400,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,82%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 25. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen administrasi pemerintahan guna mendukung kelancaran pelayanan publik.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp.14.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.175.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 26. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki akses terhadap referensi hukum dan peraturan terbaru agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.240.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,59%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 27. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD guna meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja dapat berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.159.794.000,- dan terealisasi sebesar Rp.159.794.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya partisipasi aktif dari seluruh unit kerja dalam rapat koordinasi. Solusinya

adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya koordinasi serta memastikan bahwa agenda rapat disusun dengan jelas dan relevan dengan kebutuhan semua pihak.

f) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip dinamis di lingkungan SKPD dikelola dengan baik dan aman. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa dokumen penting dapat diakses dengan mudah dan disimpan secara aman untuk keperluan administrasi dan pelaporan.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 29. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya sistem pengarsipan yang terstruktur dan minimnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan arsip. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pengarsipan digital serta memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai teknik pengelolaan arsip yang efektif.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa penunjang seperti surat menyurat, komunikasi, sumber daya air, listrik, dan pelayanan umum kantor. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh kebutuhan penunjang operasional pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lancar.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.170.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.169.753.465,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,39%.

- o Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100 %

- o Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses komunikasi internal dan eksternal dapat berjalan lancar.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.995.400,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 31. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan dan kesalahan dalam pengiriman surat serta kurangnya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan surat menyurat. Solusinya adalah

dengan menerapkan sistem manajemen surat menyurat berbasis teknologi serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman surat.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh fasilitas pemerintahan memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya tersebut.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik didukung dengan anggaran sebesar Rp.64.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.63.759.265,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,92%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 32. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh fasilitas kantor dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional kerja.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 33. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
- Tidak terdapat permasalahan / nihil.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah upaya untuk menjaga kondisi dan kualitas barang-barang milik daerah yang digunakan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah agar tetap dapat digunakan dengan baik dan efektif. Pemeliharaan BMD dapat meliputi perawatan, perbaikan, dan pembaruan barang-barang tersebut.

Beberapa contoh kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya;
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
- o Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.250.594.257,- dan terealisasi sebesar Rp.249.456.858,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,55%.

- o Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 34. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)	unit	43	46	106,97 %

- o Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan
Tidak terdapat permasalahan / nihil.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas dapat dipelihara dengan baik dan pajaknya dibayarkan tepat waktu. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik dan digunakan secara optimal.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan didukung dengan anggaran sebesar Rp.182.727.757,- dan terealisasi sebesar Rp.181.673.608,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,42%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 35. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unt	17	18	105,88%

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran pajak serta kurangnya pemeliharaan terhadap kendaraan dinas. Solusinya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta memperkuat koordinasi antar unit kerja untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas dapat dipelihara dengan baik.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dan mesin lainnya dapat dipelihara dengan baik. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh peralatan dan mesin dapat berfungsi dengan baik dan digunakan secara optimal.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya didukung dengan anggaran sebesar Rp.28.766.500,- dan terealisasi sebesar Rp.28.712.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,81%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 36. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unt	25	25	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah keterbatasan anggaran serta kurangnya pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin yang ada. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan, disertai dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan pemerintahan dapat dipelihara dengan baik. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh fasilitas kantor dapat berfungsi dengan baik dan digunakan secara optimal.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya didukung dengan anggaran sebesar Rp.39.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.071.250,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,93%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 37. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unt	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasan anggaran serta kurangnya pemeliharaan terhadap gedung kantor dan bangunan lainnya. Solusinya adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan..

2. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik melalui perencanaan dan pengelolaan tata wilayah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya program ini, diharapkan setiap desa memiliki perencanaan tata ruang yang jelas serta mampu mengelola pembangunan infrastruktur desa secara optimal. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan kapasitas pemerintah desa dalam memahami peraturan terkait tata wilayah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembangunan di desa.

- Target dan Realisasi Keuangan Program
Program Penataan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.215.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.213,479,100,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,29%.
- Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Tabel 38. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penataan Desa

No	Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penataan Desa				
1	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	100	100	100 %
2	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	%	100	100	100 %

- **Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program**
 Kurangnya pemahaman aparat desa mengenai tata ruang dan peraturan yang berlaku menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, keterbatasan anggaran sering kali menghambat pembangunan infrastruktur desa yang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa agar lebih memahami aspek regulasi dan teknis terkait tata kelola desa. Selain itu, optimalisasi penggunaan dana desa perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

- Kegiatan ini mencakup fasilitasi tata wilayah desa serta pembangunan sarana dan prasarana desa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan desa memiliki peta tata ruang yang jelas serta dapat membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan**
 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.215.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.213.479.100,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,29%.
 - **Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**

Tabel 39. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa				
1	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	162	162	100 %
2	Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	jumlah	1500	1949	129,93 %

- **Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan**
 Beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam menetapkan tata wilayah yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Solusinya adalah memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia dengan lebih optimal.
- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis kepada desa dalam penyusunan tata wilayah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya fasilitasi ini, desa diharapkan memiliki dokumen tata ruang yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.582.600,- sehingga capaian anggaran sebesar 94,33%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 40. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa				
1	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	162	162	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kurangnya pemahaman mengenai perencanaan tata ruang di tingkat desa menyebabkan beberapa desa masih belum memiliki dokumen tata wilayah yang memadai. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan bimbingan teknis yang berkelanjutan kepada aparat desa serta menyediakan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang.
- Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 2. Monitoring dan Evaluasi Penataan Dusun se-Kabupaten Karanganyar Tahap II (Selasa, 30 April 2024)

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam membangun sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.190.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189.896.500,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,95%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 41. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	unt	1500	1949	129,93 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Banyak desa masih mengalami keterbatasan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana karena minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan infrastruktur. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana desa secara efektif, mencari sumber pendanaan tambahan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 3. Desk LPJ Bankeu Sarpras Prov. Jateng Tahun 2024 (Senin, 29 Juli 2024)

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa bertujuan untuk mendorong desa agar lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerja sama antar desa dapat mempercepat pembangunan dan mempermudah akses sumber daya yang lebih luas. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan kelembagaan desa agar lebih inovatif dalam mencari solusi bagi kebutuhan masyarakat.

- Target dan Realisasi Keuangan Program
Program Peningkatan Kerjasama Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.124.324.289,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,46%.
- Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Tabel 42. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa

No	Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	95	95	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program
Minimnya inisiatif desa dalam membangun kerja sama serta keterbatasan pemahaman mengenai manfaat kerja sama menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini. Beberapa desa masih enggan menjalin kolaborasi dengan desa lain atau pihak ketiga karena kurangnya pemahaman terhadap manfaat kerja sama yang dapat diperoleh. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya kerja sama desa serta fasilitasi pertemuan antara desa dengan calon mitra potensial agar kerja sama yang dibangun dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

1) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah desa yang menjalin kerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga. Dengan adanya fasilitasi ini, desa diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.124.324.289,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,46%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 43. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa				
1	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	dokumen	3	3	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Kurangnya koordinasi antara desa dalam menjalin kerja sama menyebabkan belum optimalnya manfaat yang bisa diperoleh. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat komunikasi antar desa serta menyediakan regulasi yang mendukung kerja sama tersebut.

a) Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam membangun kawasan perdesaan yang terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, desa dapat mengoptimalkan potensi lokal dalam pembangunan kawasan perdesaan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota didukung dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.74.534.950,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,38%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 44. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				
1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kurangnya perencanaan yang matang dalam pembangunan kawasan perdesaan menyebabkan implementasi program sering kali kurang efektif. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyusun rencana strategis kawasan perdesaan serta meningkatkan sinergi antara desa dalam pelaksanaan pembangunan.

b) Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam membangun kawasan perdesaan yang terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, desa dapat mengoptimalkan potensi lokal dalam pembangunan kawasan perdesaan.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan didukung dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.789.339,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,58%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 45. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kurangnya perencanaan yang matang dalam pembangunan kawasan perdesaan menyebabkan implementasi program sering kali kurang efektif. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyusun rencana strategis kawasan perdesaan serta meningkatkan sinergi antara desa dalam pelaksanaan pembangunan.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 4. Rakor Kawasan Perdesaan Kab. Karanganyar (Senin, 9 Desember 2024)

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa mendukung tata kelola pemerintahan desa agar lebih tertata, transparan, dan akuntabel. Administrasi pemerintahan desa yang baik akan membantu dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif serta penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, program ini juga memastikan bahwa desa memiliki dokumen perencanaan seperti APBDes dan RKPDes yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

- Target dan Realisasi Keuangan Program

Program Administrasi Pemerintahan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.3,636,874,800,- dan terealisasi sebesar Rp.3,567,951,199,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,10%.

- Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Tabel 46. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	100	100	100 %
2	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	%	84	84,56	100,67 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program
Banyak desa yang belum memiliki APBDes dan RKPDdes yang sesuai ketentuan, serta masih adanya ketidaktertiban administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat berdampak pada ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa serta mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan secara berkala agar pemerintah desa lebih siap dalam menjalankan tugasnya.

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan regulasi. Melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.636.874.800,- dan terealisasi sebesar Rp.3.567.951.199,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,10%.
- Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 47. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
1	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	desa	162	162	100 %
2	Jumlah desa tertib pengelolaan aset	desa	162	162	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menyebabkan masih adanya ketidaktertiban dalam penyusunan dokumen administrasi desa. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan teknis terkait administrasi pemerintahan serta meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan administrasi desa.

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar berjalan dengan tertib dan sesuai dengan regulasi. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.147.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp.141.142.500,- sehingga capaian anggaran sebesar 95,66%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 48. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan teknis terkait administrasi pemerintahan serta meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan administrasi desa.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 5. Pembinaan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Selasa, 19 November 2024)

b) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam menyusun berbagai produk hukum seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya fasilitas ini, desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.46.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.839.700,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,46%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 49. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	4	4	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun produk hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dan regulasi yang harus diikuti. Solusinya adalah dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan produk hukum desa serta memfasilitasi koordinasi dengan pihak yang berwenang.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 6. Rapat Sosialisasi Produk Hukum Desa (Rabu, 12 Juni 2024)

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen ini mencakup RPJMDes, RKPDes, serta APBDes sebagai panduan dalam pembangunan desa yang lebih terarah.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.744.789,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,77%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 50. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	4	4	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Masih banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena kurangnya kapasitas aparatur desa. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 7. Rakor Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa dalam Perencanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi oleh Pemerintah Desa (Selasa, 30 Juli 2024)

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan transparan. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan desa dapat mengelola anggaran dengan baik serta memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.912.574.400,- dan terealisasi sebesar Rp.2.868.284.745,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,48%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 51. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				
1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	2	2	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan secara berkala serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 8. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa Via CMS Bank Daerah dalam Penyaluran Siltap Kades dan Perangkat Desa (Jumat, 26 Juli 2024)

e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membina dan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta lembaga kerja sama antar desa. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan BUMDes dan lembaga kerja sama dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar desa.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.166.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp.163.481.200,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,02%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 52. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama dalam mengelola usaha. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan usaha.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 9. Mendampingi Sampling BPKP tentang Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Kinerja BUM Desa Tahun Buku 2023 pada Kab. Karanganyar (Rabu, 22 Mei 2024)

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya fasilitasi ini,

diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa dilakukan dengan baik.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.983.400,- sehingga capaian anggaran sebesar 91,93%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				
1	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait proses pemilihan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses tersebut.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 10. Seleksi Tambahan Calon Kades PAW Antar Waktu Desa Berjo (Senin, 19 Februari 2024)

g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan baik.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.29.605.400,- dan terealisasi sebesar Rp.28.548.900,- sehingga capaian anggaran sebesar 96,43%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 54. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
1	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	laporan	40	40	100 %

- **Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan**
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait proses tersebut serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian.
- **Foto / Dokumen Sub Kegiatan**



Gambar 11. Rakor Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selasa, 19 September 2024)

h) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam menyusun profil desa yang akurat dan komprehensif. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan desa dapat memiliki dokumen profil yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah memastikan bahwa desa memiliki dokumen profil yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan.

- **Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan**
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.19.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.279.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 95,70%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 55. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa				
1	Jumlah Dokumen Profil Desa	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun profil desa. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan profil desa serta memfasilitasi akses terhadap data yang diperlukan.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 12. Monev Pengisian Aplikasi Prodeskel dan Epdeskel (Senin, 18 Maret 2024)

i) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam mengelola aset desa secara efektif dan transparan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan desa dapat mengelola aset dengan baik serta memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.881.500,- sehingga capaian anggaran sebesar 90,51%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 56. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan aset. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan pengelolaan aset secara berkala serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset desa.

j) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan BPD dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kinerja BPD dalam mendukung pembangunan desa.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD didukung dengan anggaran sebesar Rp.96.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.94.127.300,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,28%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 57. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				
1	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	162	162	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses terhadap informasi yang diperlukan.
- Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 13. Pembinaan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Wilayah Kecamatan Jaten (Selasa, 22 Oktober 2024)

k) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi evaluasi perkembangan desa serta penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan desa dapat mengevaluasi perkembangan pembangunan serta meningkatkan motivasi untuk berprestasi melalui lomba desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui evaluasi dan kompetisi.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
 Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.638.165,- sehingga capaian anggaran sebesar 96,14%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 58. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
1	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	177	177	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
 Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya partisipasi desa dalam evaluasi dan lomba. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat evaluasi dan lomba serta memberikan insentif bagi desa yang berprestasi.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dirancang untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui program ini, pemerintah desa diharapkan dapat memberdayakan lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna agar lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang masih hidup di masyarakat desa.

- Target dan Realisasi Keuangan Program
 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didukung dengan anggaran sebesar Rp.7,980,700,000,- dan terealisasi sebesar Rp.7,976,604,842,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,95%.
- Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Tabel 59. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	%	80	80	100 %
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	100	100	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola kegiatan ekonomi serta minimnya dukungan bagi lembaga kemasyarakatan untuk berkembang. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan menyebabkan program-program yang dijalankan kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan serta akses pendanaan yang lebih luas bagi usaha ekonomi desa agar lembaga kemasyarakatan dapat lebih mandiri dan berdaya.

1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lembaga kemasyarakatan dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

- Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan anggaran sebesar

Rp.6.059.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.056.074.892,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,25%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 60. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan

Kendala utama dalam kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mengelola kegiatan ekonomi serta minimnya dukungan bagi lembaga kemasyarakatan untuk berkembang. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan usaha.

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan lembaga kemasyarakatan dapat lebih aktif dalam

mendukung pembangunan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat didukung dengan anggaran sebesar Rp.186.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.186.180.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,91%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 61. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mengelola kegiatan ekonomi serta minimnya dukungan bagi lembaga kemasyarakatan untuk berkembang. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan usaha.

b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan lembaga kemasyarakatan dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.509.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.506.369.200,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,94%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 62. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mengelola kegiatan ekonomi serta minimnya dukungan bagi lembaga kemasyarakatan untuk berkembang. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan usaha.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan desa dapat mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.750.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,38%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 63. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	2	2	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola usaha ekonomi. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan usaha.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 14. Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (UP2K0PKK) (Selasa, 22 Oktober 2024)

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan desa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

➤ Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna didukung dengan anggaran sebesar Rp.52.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.031.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,87%.

➤ Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 64. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	2	2	100 %

➤ Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa mengenai teknologi tepat guna. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses terhadap teknologi yang diperlukan.

➤ Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 15. Fasilitas Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Karanganyar (Kamis, 8 Agustus 2024)

e) Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa.

Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.542.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.542.568.950,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,98%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 65. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	2	2	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat gotong royong serta memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi.
- Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 16. Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III (Rabu, 24 Juli 2024)

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan masyarakat desa dapat hidup dengan aman dan nyaman. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui ketentraman dan ketertiban.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.000.000,- sehingga capaian anggaran sebesar 100%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 66. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya ketentraman dan ketertiban serta memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi.

g) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan PKK dapat lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan utama sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

- Target dan Realisasi Keuangan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga didukung dengan anggaran sebesar Rp.550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.549.705.692,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,95%.
- Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 67. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1	100 %

- Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan
Kendala utama dalam sub kegiatan ini adalah kurangnya kapasitas Tim Penggerak PKK dalam mengelola kegiatan pemberdayaan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala serta memfasilitasi akses pendanaan untuk pengembangan kegiatan.
- Foto / Dokumen Sub Kegiatan



Gambar 17. Pembinaan Administrasi 10 Program Pokok PKK (Jumat, 8 Maret 2024)

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 68. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68,221,000	66,976,100	98.18%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,678,103,472	4,560,589,193	97.49%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123,149,000	113,592,000	92.24%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	3,995,500	99.89%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,010,483	99,827,400	99.82%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,175,000	14,175,000	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,320,000	3,240,000	97.59%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159,794,000	159,794,000	100.00%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,000,000	2,000,000	100.00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	5,995,400	99.92%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,800,000	63,759,265	98.39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,000,000	99,998,800	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182,727,757	181,673,608	99.42%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,766,500	28,712,000	99.81%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39,100,000	39,071,250	99.93%
II	PROGRAM PENATAAN DESA			
1	Penyelenggaraan Penataan Desa			
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25,000,000	23,582,600	94.33%
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	190,000,000	189,896,500	99.95%
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	75,000,000	74,534,950	99.38%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50,000,000	49,789,339	99.58%
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	147,545,000	141,142,500	95.66%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	46,555,000	45,839,700	98.46%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110,000,000	109,744,789	99.77%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,912,574,400	2,868,284,745	98.48%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	166,790,000	163,481,200	98.02%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25,000,000	22,983,400	91.93%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	29,605,400	28,548,900	96.43%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19,100,000	18,279,000	95.70%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75,000,000	67,881,500	90.51%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	96,760,000	94,127,300	97.28%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7,945,000	7,638,165	96.14%
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	186,340,000	186,180,000	99.91%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5,509,400,000	5,506,369,200	99.94%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40,000,000	39,750,000	99.38%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	52,100,000	52,031,000	99.87%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1,542,860,000	1,542,568,950	99.98%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100,000,000	100,000,000	100.00%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	550,000,000	549,705,692	99.95%
Jumlah		17,535,742,012	17,329,758,946	98,83 %

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 17.329.758.946,00 atau mencapai 98,83 % dari pagu anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp. 17.535.742.012,00 Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh adanya beberapa PNS yang pensiun sehingga penyerapan anggaran belanja operasional tidak maksimal.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 69. Efisiensi Capaian Penggunaan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7088	0,7379	104,1 %	Rp. 11.882.359.430,00	0,63 %
2	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	70,20*	96,16 %	Rp. 5.447.399.516,00	2,34 %

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

Dari anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi sasaran I yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.957.574.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.882.359.430,00, sehingga selisih pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 75.215.370,00 (0,63%), yang mana merupakan efisiensi anggaran. Sedangkan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi Sasaran II yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.578.167.212,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.447.399.516,00, sehingga terdapat selisih pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 130.767.696,00 (2,34%), yang mana merupakan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam realisasi anggaran, sebagian besar program telah dilaksanakan dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Program-program prioritas seperti fasilitasi penataan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, dan dukungan terhadap pengembangan usaha ekonomi masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, optimalisasi pelatihan bagi aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan administrasi desa. Evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya komitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program-program yang lebih inovatif serta berbasis kebutuhan masyarakat, diharapkan kinerja di tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal dan berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

4.2. SARAN

- Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Antarpemangku Kepentingan

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, perlu adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Komunikasi yang baik akan memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan

kebutuhan di lapangan dan meminimalkan hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa agar lebih memahami peraturan, tata kelola keuangan, serta perencanaan pembangunan. Selain itu, pelatihan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi dan teknologi dapat meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan desa.

- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa harus lebih dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi administrasi, penggunaan aplikasi keuangan desa, serta sistem informasi desa dapat membantu mempercepat proses pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran.

- Evaluasi dan Pengembangan Program Secara Berkelanjutan

Setiap program yang telah berjalan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perencanaan program di tahun berikutnya agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**

- Tugas

: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- Fungsi

:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan

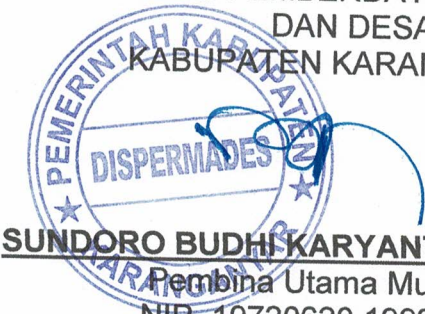
4. Pelaksanaan administrasi Dinas

5. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Nilai SAKIP adalah skor yang diperoleh dari evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Nilai SAKIP	• Formulasi Pengukuran : Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Karanganyar

2	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan tiga aspek utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM digunakan untuk menilai sejauh mana desa telah mencapai kemajuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Indeks Desa Membangun	• Formulasi pengukuran : $IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : idm.kemendesa.go.id
---	--	---	-----------------------	---

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720620 199203 1 002

PENGUKURAN KINERJA

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGNYAR**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7088	0,7379	104,25 %
2	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	70,20	96,16 %

*) Realisasi Nilai SAKIP menggunakan penilaian SAKIP 2023

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 17.535.742.012,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 17,329,758,946,00

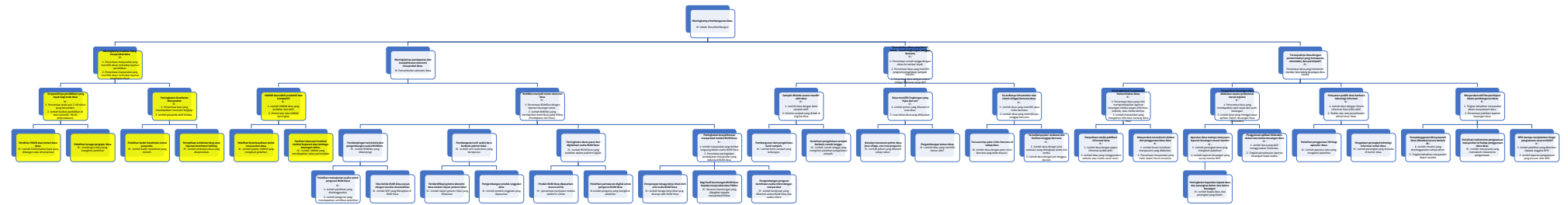
Karanganyar, Februari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720620 199203 1 002

POHON KINERJA





CASCADING

CASCADING PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	2	3	4	8	9	13	14
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Program Penataan Desa	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Desa
	Fasilitasi tata wilayah desa					Jml desa yg mendapatkan monitoring kelembagaan RT, jml desa yang menyusun peta batas desa	
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa					Jml Desa yang dibintek penyusunan RAB Kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa	
	Indeks Desa Membangun			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan; Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jml Petugas SID, Jml Desa yang dikoordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya, jml desa yang di movev
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jml Produk hukum yg tersusun, Jml peserta sosialisasi produk hukum, Jml perda & perbup ttng penyelenggaraan pemerintahan desa yg disusun
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					Jml peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeudes, Jml desa yg menyesuaikan penyusunan APBDes	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					Jml Desa terfasilitasi asistensi dana desa, Jml desa yg menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah, Jml desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa					Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa, Jml kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala					Jml formasi kepala desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jml formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan					
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jml desa.kel yang memiliki profil desa					
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	fasilitasi dan monitoring aset desa, terlaksananya fasilitas perijinan atau permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatn tanah kas desa					
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jml desa/kel yang mengikuti lomba					
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa
						Fasilitasi kerjasama antardesa dalam kabupaten/kota	Terbinanya kelembagaan antar desa
						Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan	terbentuknya kawasan desa dan berjalan aktif
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jml Posyandu yang dibina, Jml Rakor PKK, Jml Kader KPMD yang dibina, Jml Satgas Adat yang difasilitasi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	2	3	4	8	9	13	14
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BPSPAM yang dibina, Jml Kader posyandu yang dibina
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibinaJumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibina
						Fasilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	Desa TMMD I, Desa TMMD II, Desa TMMD III, Des/kel yg melaksanakan GRM
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jml TP PKK yang dibina
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml Laporan
						Administrasi KeuanganPemerintah Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
						Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml SDM yang meningkat kapasitasnya, Jml SDM yang dinilai angka kredit
						Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml perlengkapan kantor yg tersedia, jml alat tulis kantor cukup setiap bln, peralatan kantor yang baik
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perpu yang baik
						Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum kantor, rapat koordinasi dan konsultasi keluar.dalam daerah
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml surat menyurat yang tersedia
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan litrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebersihan dan keamanan kantor, tersedianya administrasi kantor yang baik, tersedianya alat kebersihan yang cukup
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
						Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik, Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

RENCANA AKSI

FORMULIR RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Tahun : 2025

Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Nilai SAKIP	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	0	Triw IV
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	0	Triw IV
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	Triw I
						laporan	1	Triw II
						laporan	1	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	40	Triw I
						orang/bulan	40	Triw II
						orang/bulan	40	Triw III
						orang/bulan	40	Triw IV
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	Triw I
						orang	8	Triw II
						orang	0	Triw III
						orang	8	Triw IV
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	Triw I
						paket	3	Triw II
						paket	3	Triw III
						paket	3	Triw IV
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	Triw I
						paket	1	Triw II
						paket	1	Triw III

Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	Triw IV
						paket	3	Triw I
						paket	3	Triw II
						paket	3	Triw III
						paket	3	Triw IV
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	Triw I
						dokumen	1	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	Triw I
						laporan	3	Triw II
						laporan	3	Triw III
						laporan	3	Triw IV
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	Triw I
						laporan	0	Triw II
						laporan	0	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	Triw I
						laporan	1	Triw II
						laporan	1	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	Triw I
						laporan	1	Triw II
						laporan	1	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	Triw I
						unit	4	Triw II
						unit	4	Triw III
						unit	3	Triw IV
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	Triw I
						unit	6	Triw II
						unit	6	Triw III
						unit	7	Triw IV
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	Triw I
						unit	0	Triw II
						unit	0	Triw III
						unit	1	Triw IV
Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,7379	Program Penataan Desa	Fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	0	Triw I
						desa	0	Triw II
						desa	0	Triw III
						desa	162	Triw IV
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	unit	375	Triw I
						unit	375	Triw II
						unit	375	Triw III
						unit	375	Triw IV

Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	1	Triw I
						dokumen	1	Triw II
						dokumen	1	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	1	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	laporan	0	Triw I
						laporan	1	Triw II
						laporan	0	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	1	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	0	Triw I
						laporan	0	Triw II
						laporan	0	Triw III
						laporan	1	Triw IV
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	40	Triw IV
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	dokumen	0	Triw I
						dokumen	0	Triw II
						dokumen	0	Triw III
						dokumen	1	Triw IV

Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	0	Triw I	
					orang	0	Triw II		
					orang	0	Triw III		
					orang	162	Triw IV		
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	0	Triw I	
					dokumen	0	Triw II		
					dokumen	0	Triw III		
					dokumen	177	Triw IV		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	0	Triw I	
					orang	0	Triw II		
					orang	0	Triw III		
					orang	162	Triw IV		
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	0	Triw I
						dokumen	1	Triw II	
						dokumen	1	Triw III	
						dokumen	1	Triw IV	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PT, RW, PKK)		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	lembaga	0	Triw I	
					lembaga	0	Triw II		
					lembaga	0	Triw III		
					lembaga	1	Triw IV		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	0	Triw I		
					dokumen	1	Triw II		
					dokumen	0	Triw III		
					dokumen	1	Triw IV		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	0	Triw I		
					laporan	1	Triw II		
					laporan	0	Triw III		
					laporan	1	Triw IV		
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	1	Triw I					
		laporan	1	Triw II					
		laporan	1	Triw III					
		laporan	2	Triw IV					
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	0	Triw I					
		dokumen	0	Triw II					
		dokumen	0	Triw III					
		dokumen	1	Triw IV					

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGNYAR

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar
Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	74 %
2	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,7379

Karanganyar, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720620 199203 1 002

LHE AKIP TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

Nomor : 700/39/PWS/2024
Tanggal : 24 Juni 2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

Nomor : 700/39/PWS/2024
Tanggal : 24 Juni 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id, email inspektorat_kra@yahoo.co.id

Karanganyar, 24 Juni 2024

Kepada:

Nomor : 700/39/PWS/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar
di-
KARANGANYAR

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- e. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/78 Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi Aparat Pengawas Internal Internal Pemerintah.

f. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 800.1.11.1/ 80/PWS/2024 tanggal 22 Mei 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d 31 Mei 2024.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang

memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

5. Kriteria Penilaian

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja

			telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level OPD.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Metodologi Evaluasi

- a. Wawancara
- b. Penelaahan dokumen
- c. Analisis

7. Gambaran Umum Unit Kerja

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Penanggungjawab Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos.	Kepala Dinas	197206201992031002
2	Soenarto, S.P., M.M.	Sekretaris	197103151997031009

No	Nama	Jabatan	NIP
3	Yosep Anung Darmawan, S.E.	Kepala Bidang Adminstrasi Pemerintahan Desa	197205282005011005
4	Diana Ary Andriyati, S.H.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	198307042006042008
5	Ary Widyahastutik, S.S.T.P., M.M.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	198201232000122001
6	Agus Cahyono, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Umum	197108112006041011

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.
- Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- Rencana Aksi Tahun 2023.
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023.
- Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2023.

Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	persentase	4,94

		Indeks Desa Mandiri (IDM)	nilai	0,7078
		Indeks Ketahanan Sosial	nilai	0,8227
		Indeks Ketahanan Ekonomi	nilai	0,6648
		Indeks Ketahanan Lingkungan	nilai	0,6358
2.	Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	persentase	83
3.	Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	persentase	17,54
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	persentase	18

5.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	nilai	79
----	--	-------------	-------	----

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 di ketahui bahwa dari 4 (empat) rekomendasi telah selesai ditindak lanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **70,20** dengan predikat “ **BB** ” (**sangat baik**). Pencapaian predikat “BB” (sangat baik) tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
b. Pengukuran Kinerja	30,00	20,40
c. Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Jumlah	100,00	70,20

- Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen - komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja (nilai 21,00 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu :

- 1) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.
 - 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya tercapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- b. Pengukuran Kinerja (nilai 20,40 dari bobot 30,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum memiliki pedoman teknis/SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja.
 - 2) Penggunaan aplikasi SMART SAKIP untuk pengukuran kinerja belum optimal.
- c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:
- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - 3) Laporan kinerja telah mengungkap informasi pencapaian kinerja pada level sasaran strategis organisasi. Namun demikian untuk analisis pencapaian kinerja pada level program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja belum diinformasikan.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 18,00 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tuan	Target	Realisa si	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkat kan kemandi rian dan kesejah teraan masyara kat Desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	nilai	4,94	5,6	130,23
		Indeks Desa Membangun (IDM)	nilai	0,7078	0,7162	101,19
		Indeks Ketahanan Sosial	nilai	0,8228	0,8214	99,83
		Indeks Ketahanan Ekonomi	nilai	0,6648	0,6746	101,47
		Indeks Ketahanan Lingkungan	nilai	0,6358	0,6527	102,66
2.	Meningkat kan kualitas administra si pemerinta	Persentase desa tertib administrasi	Per sen tase	83	83,3	100,36

	han desa					
3.	Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Persentase	17,54	17,54	100
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Persentase	18	17,15	95,28
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	nilai	79	69,35	87,8

Dari tabel diatas terdapat target kinerja yang tidak tercapai yaitu

- a) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa (Indeks Ketahanan Sosial) yaitu dari target 0,8228 terealisasi 0,8214 sehingga prosentase capaiannya 99,83%
- b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dari target 18 terealisasi 17,15 sehingga prosentase capaiannya 95,28%
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu dari target 79 hanya terealisasi 69,35 sehingga prosentase capaiannya 87,8%, sesuai analisis yang dicantumkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja. Dalam SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang. Dalam SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan kegiatan revidi data kinerja oleh APIP. Selanjutnya pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dilaksanakan mempedomani SOP dimaksud dan dilaksanakan secara berkala (bulanan/tri bulanan/semester/tahunan) dan berkelanjutan
- b. Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan.
- c. Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.
- d. Mulai tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu:
 - 1) Melengkapi/menginput ke dalam menu data Renstra dengan informasi:
 - a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing.
 - b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data
 - 2) Melengkapi/menginput ke dalam menu progres kinerja dengan informasi:
 - a) Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator

- kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan.
- b) Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja.
 - 3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja.
 - 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment.
 - e. Menyelaraskan indikator Kinerja dan Target Kinerja antara Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKJiP.
 - f. Menyajikan definisi operasional pada Indikator Kinerja Utama.

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.



PIN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760922 200312 1 003

Tembusan :

- 1. Pj. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
- 2. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2023

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar**

NO	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
1.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaiankinerja. Dalam SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang. Dalam SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan kegiatan reviu data kinerja oleh APIP. Selanjutnya pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dilaksanakan mempedomani SOP dimaksud dan dilaksanakan secara berkala (bulanan/ tribulan/ semester/ tahunan) dan berkelanjutan.	Menyusun dan menetapkan SOP yang mencakup mekanisme pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, verifikasi dan validasi data secara berjenjang, serta reviu oleh APIP. Implementasi SOP akan dilakukan secara berkala sesuai dengan periode yang ditetapkan (bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan).	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41IYebA
2.	Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/ kegiatan.	Melakukan analisis terhadap faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja berdasarkan data hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan. Analisis ini kemudian dituangkan dalam laporan kinerja tahunan dengan rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya.	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41IYebA
3.	Mengajukan permintaan reviu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Mengajukan permohonan resmi kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas laporan kinerja tahunan sebelum ditetapkan guna memastikan akurasi dan validitas data.	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41IYebA
4.	Mulai tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu: 1) Melengkapi/meng-input ke dalam menu data Renstra dengan informasi: a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing. b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data	Menginput seluruh data yang dibutuhkan ke dalam aplikasi SMART SAKIP, termasuk indikator sasaran, program, kegiatan, target kinerja, realisasi capaian, serta faktor pendukung dan penghambat. Aplikasi juga akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pemberian reward/punishment.	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41IYebA

	2) Melengkapi/meng-input ke dalam menu progres kinerja dengan informasi: a) Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan. b) Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja. 3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja. 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment.				
5.	Menyelaraskan indikator kinerja dan target kinerja antara Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKjIP	Melakukan review dan penyesuaian indikator dan target kinerja agar konsisten dalam semua dokumen perencanaan dan pelaporan, serta mengadakan koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan keselarasan.	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41lYebA
6.	Menyajikan definisi operasional pada indikator kinerja utama.	Menyusun dan mendokumentasikan definisi operasional untuk setiap indikator kinerja utama guna memastikan kejelasan dan keseragaman dalam proses evaluasi kinerja.	Kepala Dinas	Selesai	https://bit.ly/41lYebA



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
No. 19720620 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Pj. Bupati Karanganyar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun : 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka kemiskinan	8,52 %
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,7088
2	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.062.892.362,00	APBD
2	Program Penataan Desa	225.000.000,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.867.484.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	125.000.000,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7.515.600.000,00	APBD
Jumlah		16.795.976.362,00	APBD

Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

Karanganyar, 5 Februari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOENARTO, S.P., M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 17 Januari 2024

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

Pihak pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

SOENARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)	43 unit

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.518.337.822,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.017.033,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.200.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.337.507,00	APBD
Jumlah		5.062.892.362,00	APBD

Karanganyar, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


SOEMARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS CAHYONO, S. Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOENARTO, S.P., M.M.

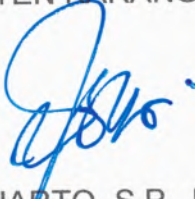
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

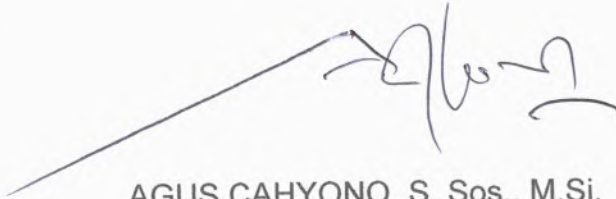
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


SOENARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

Karanganyar, 17 Januari 2024
Pihak pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM


AGUS CAHYONO, S. Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19710811 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang / bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laporan

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.518.337.822,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.697.033,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.320.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1.000.000,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.973.507,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.264.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.100.000,00	APBD
	Jumlah	5.062.892.362,00	APBD

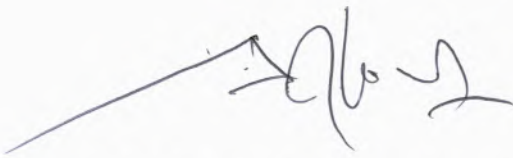
Karanganyar, 17 Januari 2024

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SOENARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

KEPALA SUB BAGIAN UMUM



AGUS CAHYONO, S. Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19710811 200604 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 17 Januari 2024
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19720528 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1134 orang
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	35.000.000,00	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	120.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50.000.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	32.510.400,00	APBD
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000,00	APBD
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	100.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	5.450.600.000,00	APBD
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00	APBD
Jumlah		6,348,110,400.00	APBD

Karanganyar, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19720528 200501 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 17 Januari 2024

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA

DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19830704 200604 2 008

Pihak kedua,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.199.973.600,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75.000.000,00	APBD
	Jumlah	3.384.973.600,00	APBD

Karanganyar, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720620 199203 1 002

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DESA



DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19830704 200604 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 17 Januari 2024

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP. 19820123 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	842 unit
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	190.000.000,00	APBD
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	75.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	120.000.000,00	APBD
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	199.200.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55.800.000,00	APBD
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.150.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.000,00	APBD
Jumlah		2.000.000.000,00	APBD

Karanganyar, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA



ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP. 19820123 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Pj. Bupati Karanganyar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Karanganyar, 25 November 2024

Pihak pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOENARTO, S.P., M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
Pihak pertama,
SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SOENARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
SUB BAGIAN UMUM

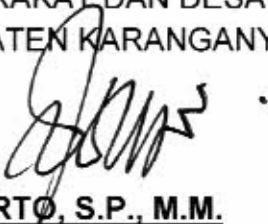
No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA- SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang / bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.221.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.678.103.472,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.149.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.010.483,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.175.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.320.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.794.000,00	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	2.000.000,00	APBD

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.727.757,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.766.500,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.100.000,00	APBD
Jumlah		5.578.167.212,00	APBD

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


SOENARTO, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710315 199703 1 009

Karanganyar, 4 November 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM


AGUS CAHYONO, S. Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19710811 200604 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA



YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E

Penata Tingkat I

NIP. 19720528 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25.000.000,00	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	147.545.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	46.555.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	29.605.400,00	APBD
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.100.000,00	APBD
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	96.760.000,00	APBD
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.945.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.509.400.000,00	APBD
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	550.000.000,00	APBD
Jumlah		6.456.910.400,00	APBD

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA



YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19720528 200501 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA



DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.
Pembina
NIP. 19830704 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.912.574.400,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75.000.000,00	APBD
	Jumlah	3.097.574.400,00	APBD

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA



DIANA ARY ANDRIYATI, S.H.
Pembina
NIP. 19830704 200604 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

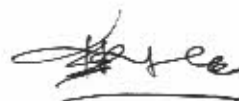
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA



ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP. 19820123 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	842 unit
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen
--	---	--	-----------

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	190.000.000,00	APBD
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	75.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	166.790.000,00	APBD
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	186.340.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	52.100.000,00	APBD
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.542.860.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.000,00	APBD
Jumlah		2.403.090.000,00	APBD

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Karanganyar, 4 November 2024
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA



ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP. 19820123 200012 2 001